



Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program "Rodanya Mas Bagia" Di Kota Magelang

Muhammad Zainuri¹⁾, Nur Fitri Mutmainah²⁾

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Gamping, Sleman, Indonesia

Mzainuri447@gmail.com¹⁾
nurfitrimutmainah@unisayogya.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat melalui program 'Rodanya Mas Bagia' di Kota Magelang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan pemangku kepentingan utama, termasuk perwakilan pemerintah, pendamping program, dan warga setempat. Penelitian ini menggunakan indikator partisipasi tujuh tingkat dari Jules Pretty sebagai kerangka utama. Hasil penelitian menunjukkan variasi tingkat partisipasi masyarakat, dengan dominasi pada tahap pasif dan konsultatif, sementara tingkat swakelola sepenuhnya masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program telah berhasil membentuk fondasi pemberdayaan masyarakat, tetapi diperlukan upaya peningkatan kapasitas untuk mencapai partisipasi yang interaktif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang pembangunan partisipatif dengan menawarkan wawasan untuk perbaikan program berbasis masyarakat di masa depan.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, Partisipasi, Rodanya Mas Bagia

Abstract

This research aims to analyze community empowerment strategies through the 'Rodanya Mas Bagia' program in Magelang City. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews and documentation with key stakeholders, including government representatives, program facilitators, and local residents. The study applies Jules Pretty's seven-level participation indicators as the main framework. The findings reveal varying levels of community participation, predominantly at the passive and consultative stages, while fully independent self-management remains limited. The research concludes that the program has successfully laid the foundation for community empowerment but requires enhanced capacity-building efforts to achieve sustainable and interactive participation. The study contributes to the field of participatory development by offering insights for improving future community-based programs.

Keyword: Community empowerment, Participation, Rodanya Mas Bagia

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan, bertujuan memenuhi kebutuhan kini dan masa depan (Anggi Maharani Nasution et al., 2023), menjadi krusial dalam era globalisasi untuk meningkatkan taraf hidup inklusif dan berkelanjutan, di mana pemerintah Indonesia periode 2020-2024 menekankan kolaborasi multipihak dalam mencapai SDGs terintegrasi dalam (RPJMN) (Pemerintah RI, 2023), pembangunan ini tidak hanya fisik dan ekonomi, namun juga kesejahteraan sosial untuk pemerataan manfaat (Azizah et al., 2022), sehingga pentingnya mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat

menjadi program penting dalam pembangunan berkelanjutan, bertujuan mengembangkan keterampilan, meningkatkan pendapatan, akses informasi dan sumber daya, kemandirian, hubungan sosial, serta potensi diri di berbagai bidang. (Katili et al., 2022), menegaskan pemberdayaan masyarakat sebagai elemen vital dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses multidimensional yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola kehidupan mereka secara mandiri dan bermartaba (Afdhal et al., 2023). Proses ini tidak hanya terbatas pada peningkatan ekonomi melalui pemberian modal atau pelatihan keterampilan, tetapi juga mencakup penguatan aspek sosial, budaya, dan politik. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya, informasi, dan kesempatan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Esensi dari pemberdayaan adalah transformasi relasi kuasa yang lebih setara, di mana kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan memiliki suara yang lebih kuat dan mampu mengadvokasi kepentingan mereka (Frahsa et al., 2025). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, karena perubahan yang sesungguhnya berasal dari inisiatif dan kapasitas masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia, landasan hukum untuk pemberdayaan masyarakat tercermin dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 2 yang secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat yang efektif harus mampu menstimulasi partisipasi aktif dan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mencapai kemajuan bersama, terutama masyarakat miskin.

Tabel 1.
Data Penduduk Kota Magelang

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (%)
2021	121.610	9.440	7,75%
2022	121.675	8.650	7,10%
2023	122.150	7.450	6,11%
2024	128.591	7.250	5,94%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Magelang mengalami peningkatan dari 121.610 jiwa pada tahun 2021 menjadi 128.591 jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan demografis yang berpotensi memperluas produktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus menuntut penguatan program pembangunan yang inklusif agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Seiring dengan bertambahnya populasi, jumlah penduduk miskin di Kota Magelang justru mengalami penurunan signifikan dari 9.440 jiwa (7,75%) pada tahun 2021 menjadi 7.250 jiwa (5,94%) pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan efektivitas berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang selaras dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, di mana peningkatan kapasitas, keterampilan, dan partisipasi warga berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi. Bahkan, pada tahun 2024 Kota Magelang berhasil mencatatkan diri sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Semarang (sekitar 4,03%) dan Kota Salatiga (sekitar 4,57%), sehingga memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya angka kemiskinan apabila diimbangi dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagai upaya memperkuat proses tersebut, Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan partisipasi dan kemandirian warga, salah satunya melalui program inovatif Rodanya Mas Bagia (Amani, 2023). Dalam program ini, setiap Rukun Tetangga (RT) menerima alokasi dana Rp. 30 juta per tahun yang dikelola melalui Rencana Kerja

Masyarakat (RKM) dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan agar sesuai dengan aspirasi lokal, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan pembangunan balai RW, tetapi juga pengembangan kapasitas manusia melalui pelatihan keterampilan menjahit atau memasak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam strategi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan melalui program “Rodanya Mas Bagia” di Kota Magelang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program serta faktor-faktor yang memengaruhinya di tingkat lokal.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Magelang karena wilayah ini merupakan salah satu daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam kurun waktu 2021–2024, sehingga relevan untuk dikaji sebagai contoh keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui program pemerintah daerah.

Data dikumpulkan melalui dua metode utama:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Wawancara dilakukan dengan delapan informan kunci, yang terdiri atas:
 - a. dua orang perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang,
 - b. dua orang pendamping program,
 - c. dua orang ketua RW/Pokmas, dan
 - d. dua orang warga penerima manfaat langsung program.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami pelaksanaan program Rodanya Mas Bagia dari sisi perencanaan hingga evaluasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh data yang mendalam namun tetap fleksibel.

2. Dokumentasi: Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumen, seperti laporan kegiatan, panduan pelaksanaan program, transkrip wawancara, serta dokumen kebijakan dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Analisis data dilakukan melalui teknik triangulasi, dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memastikan validitas temuan. Data kemudian diorganisir, diklasifikasikan berdasarkan indikator partisipasi masyarakat menurut Jules Pretty (1995), dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk serta tingkat partisipasi masyarakat dalam program Rodanya Mas Bagia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disusun berdasarkan tujuh indikator partisipasi masyarakat yang mengadaptasi kerangka Jules Pretty (1995) dan pengembangan terkini oleh (Bartels & Furman, 2023), yang menekankan pentingnya co-creation antara peneliti, pemerintah, dan masyarakat. Kerangka ini tidak hanya melihat partisipasi sebagai bentuk keterlibatan formal dalam kegiatan program, tetapi juga sebagai proses sosial yang membangun kepercayaan, kapasitas, serta ruang dialogis antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, analisis partisipasi masyarakat dalam program Rodanya Mas Bagia di Kota Magelang tidak hanya mengidentifikasi tingkat partisipasi mulai dari manipulatif, pasif, konsultatif, hingga swakelola tetapi juga menelaah bagaimana interaksi antaraktor dapat menciptakan pembelajaran bersama (*mutual learning*) dalam praktik pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan variasi tingkat partisipasi masyarakat dalam program Rodanya Mas Bagia di berbagai wilayah di Kota Magelang. Tabel berikut menyajikan temuan utama yang diidentifikasi berdasarkan tujuh indikator partisipasi.



Tabel 2.
Hasil Wawancara

Indikator Partisipasi	Temuan Utama
Partisipasi Manipulatif	Masyarakat hadir dalam pertemuan hanya sebagai formalitas dan tidak memahami tujuan program secara mendalam.
Partisipasi Pasif	Warga hanya menerima informasi tanpa memberikan masukan atau terlibat dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi dengan Konsultasi	Pendapat masyarakat diminta dalam penyusunan RKM, namun keputusan akhir tetap ditentukan pemerintah.
Partisipasi untuk Imbalan Materi	Keterlibatan masyarakat dipicu oleh pemberian insentif seperti uang transport dan bantuan lain.
Partisipasi Fungsional	Pokmas terbentuk dan berperan dalam pelaksanaan program, tetapi masih diarahkan oleh pemerintah.
Partisipasi Interaktif	Beberapa wilayah menunjukkan keterlibatan aktif dalam merencanakan dan mengevaluasi program bersama pemerintah.
Swakelola	Indikasi kemandirian mulai muncul, tetapi kelompok yang benar-benar mandiri masih sangat sedikit.

Sumber: Data Diolah Peneliti

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap hasil yang telah diperoleh, tidak hanya sekadar memaparkan data, tetapi juga memahami dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan ini, partisipasi masyarakat dalam program Rodanya Mas Bagia dipandang sebagai proses yang kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran, motivasi, dan kapasitas warga, serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, dukungan pendamping, dan ketersediaan sumber daya (Ristanto & Supardal, 2024). Pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana masyarakat benar-benar diberdayakan, bukan hanya terlibat secara administratif (Udhiya et al., 2024).

Selain itu, pembahasan juga menempatkan temuan penelitian ini dalam kerangka teori yang relevan, seperti konsep partisipasi menurut Jules Pretty dan teori pemberdayaan masyarakat lainnya. Dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori serta penelitian sebelumnya, dapat diketahui posisi program Rodanya Mas Bagia dalam konteks pembangunan partisipatif di tingkat lokal. Hal ini membantu menilai apakah program telah berjalan sesuai dengan prinsip pemberdayaan yang ideal atau masih memerlukan penyesuaian strategi agar tujuan jangka panjangnya tercapai.

Melalui proses analisis yang menyeluruh, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan, khususnya pemerintah Kota Magelang, serta pihak pendamping program. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Kampung Keluarga Berencana di Kalurahan Sendangagung (Sukrianto & Mahendra, 2023) rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperkuat program agar lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan program pemberdayaan di masa mendatang yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Partisipasi Manipulatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap partisipasi manipulatif, keterlibatan masyarakat dalam program Rodanya Mas Bagia masih bersifat simbolis. Masyarakat hadir dalam

forum seperti rembug warga karena adanya undangan dari ketua RT atau pihak kalurahan, namun sebagian besar dari mereka belum memahami tujuan program dan mekanisme pelaksanaannya. Kondisi ini menandakan bahwa partisipasi yang terbangun belum sepenuhnya memberdayakan, melainkan sekadar menunjukkan kehadiran tanpa adanya pemahaman dan kendali dari masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan melalui penelitian di Dusun Begajah, Desa Jatijajar, Kabupaten Semarang, yang menunjukkan bahwa pada beberapa pilar program sanitasi masyarakat hanya memiliki pengetahuan dasar tanpa pemahaman mendalam, sehingga keterlibatan lebih bersifat simbolik daripada substansial (Heriyanti & Rabbani, 2025).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu ketua RW yang juga bertindak sebagai salah satu Pokmas,

"Untuk di Kalurahan Cacaban, ketua RW disini wajib menjadi Pokmas. Jadi selain saya sebagai Pokmas untuk program Rodanya Mas Bagia, saya juga selaku RW. Untuk peran saya sebagai Pokmas adalah mendampingi para RT yang menjadi cakupan wilayah. Informasi detail terkait program saya dapatkan melalui perkumpulan atau sosialisasi di kalurahan dan distribusi informasi yang disampaikan pendamping," (Wawancara dengan Ketua RW/Pokmas, 11 Agustus 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya warga biasa, hanya menerima informasi yang sudah difilter oleh perangkat desa dan Pokmas, sehingga ruang mereka untuk memahami secara langsung program tersebut masih sangat terbatas.

Kondisi ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jules Pretty (1995), yang menyatakan bahwa partisipasi manipulatif terjadi ketika masyarakat hanya diikutsertakan sebagai pelengkap dalam program pembangunan tanpa memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan.

2. Partisipasi Pasif

Pada tahap partisipasi pasif, masyarakat hanya berperan sebagai penerima informasi yang bersifat satu arah, tanpa ruang yang cukup untuk memberikan tanggapan atau mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informasi mengenai program Rodanya Mas Bagia disampaikan melalui jalur komunikasi yang panjang, dimulai dari SE pemerintah kota, kemudian ke dinas DPMP4KB, selanjutnya ke pendamping program, diteruskan ke Pokmas, lalu RT, dan terakhir disampaikan kepada warga. Proses komunikasi berjenjang ini sering menyebabkan masyarakat hanya mengetahui garis besar program tanpa memahami secara menyeluruh tujuan maupun mekanisme pelaksanaannya (Putra Satria et al., 2025).

Hal ini diperkuat oleh salah satu pendamping program yang menjelaskan mekanisme alur informasi tersebut.

"Kalau untuk mekanisme komunikasi, dari pemerintah kota disampaikan melalui dinas DPMP4KB kepada kami pendamping. Kemudian kami sampaikan ke Pokmas, selanjutnya Pokmas yang menyampaikan ke RT, lalu RT yang menyampaikan ke warga," (Wawancara dengan Pendamping Program, 10 Juli 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima masyarakat bersifat satu arah, sehingga mereka cenderung mengikuti arahan tanpa adanya kesempatan yang cukup untuk memberikan umpan balik atau masukan.

Meski demikian, masyarakat mulai dilibatkan pada tahap perencanaan program tematik yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk merencanakan program pada tahun berikutnya. Forum ini dihadiri oleh warga, ketua RT, Pokmas, dan pendamping program, jika memungkinkan. Dalam forum ini, warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan kegiatan selain program wajib yang sudah ditentukan pemerintah kota. Namun, keterlibatan ini masih bersifat formalitas karena keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Salah seorang ketua RW menjelaskan,

"Biasanya jauh sebelum akhir tahun kita ada musyawarah dalam rangka menyusun program untuk tahun depan. Warga, RT, Pokmas, dan pendamping hadir. Tapi tetap ada program wajib yang sudah ditentukan pemerintah, sementara yang lain sifatnya usulan tambahan dari warga," (Wawancara dengan Ketua RW, 11 Agustus 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk menyampaikan pendapat, peran masyarakat masih terbatas pada tahap memberi saran tanpa jaminan bahwa usulan mereka akan diprioritaskan.

Fenomena ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Rodanya Mas Bagia masih didominasi pola komunikasi top-down. Menurut Jules Pretty (1995), partisipasi pasif terjadi ketika masyarakat hanya diberi tahu tentang program dan diikutsertakan pada tahap tertentu sebagai formalitas, bukan sebagai pihak yang benar-benar memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan. Penelitian (Rasidi, 2023) juga menemukan bahwa rendahnya literasi dan keterbatasan akses informasi sering kali menjadi penyebab warga hanya mengikuti instruksi yang diberikan. Jika kondisi ini tidak ditangani, maka program akan sulit mencapai tujuan pemberdayaan. Oleh karena itu, pemerintah dan pendamping program perlu mengembangkan mekanisme komunikasi dua arah yang lebih transparan, seperti forum dialog atau lokakarya tematik yang benar-benar membuka kesempatan bagi warga untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

3. Partisipasi dengan Konsultasi

Tahap partisipasi dengan konsultasi ditandai dengan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide atau pendapat dalam proses perencanaan, khususnya saat penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). RKM menjadi dokumen penting yang memuat daftar kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Proses penyusunan RKM dilakukan sekitar enam bulan sebelum pergantian tahun, sehingga memberikan waktu yang cukup panjang untuk mengakomodasi masukan dari warga dan RT. Forum perencanaan ini dihadiri oleh warga, ketua RT, Pokmas, dan pendamping program yang memfasilitasi jalannya diskusi. Penelitian di Desa Warung Bambu menunjukkan bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan desa melalui forum-musyawarah desa, meskipun keterlibatan sebagian warga masih melalui perwakilan (meningkatkan legitimasi dan kepemilikan terhadap keputusan)(Idham Noviar & Evi Priyanti, 2023).

Dalam forum ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengusulkan program yang mereka anggap prioritas. Namun, kendala utama tetap berada di tangan pemerintah kota, sementara pendamping bertindak sebagai pengarah teknis. Pokmas pada tahap ini hanya menjadi pelaksana teknis yang meneruskan informasi dan memfasilitasi diskusi di tingkat lokal, bukan sebagai pihak yang memutuskan usulan. Seorang pendamping juga menjelaskan,

"Penyusunan RKM dilakukan jauh sebelum pergantian tahun, biasanya sekitar enam bulan sebelumnya. Jadi Pokmas bersama RT dan warga melakukan musyawarah untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan diajukan. Setelah itu hasilnya kami bawa ke dinas untuk disetujui," (Wawancara dengan Pendamping Program, 10 Juli 2025).

Pernyataan ini memperjelas bahwa meskipun warga dapat memberikan masukan, keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan tetap ditentukan oleh pemerintah kota melalui dinas terkait.

Selain itu, dalam forum musyawarah tahunan, pemerintah telah menetapkan program wajib yang harus dijalankan di setiap RT. Masyarakat hanya diberi ruang untuk menambahkan program tematik sesuai kebutuhan lokal. Seorang Pokmas menjelaskan,

"Biasanya menjelang akhir tahun kita ada musyawarah untuk menyusun program tahun depan. Warga, RT, Pokmas, dan pendamping hadir. Tapi tetap ada program wajib yang sudah ditentukan pemerintah, sementara yang lain sifatnya usulan tambahan dari warga," (Wawancara dengan Pokmas, 11 Agustus 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa forum konsultasi belum sepenuhnya memberi masyarakat kebebasan dalam menentukan arah program, karena keputusan strategis tetap diatur oleh pemerintah kota.

Menurut teori Jules Pretty (1995), partisipasi konsultatif terjadi ketika masyarakat diminta pendapatnya, namun pihak luar tetap memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian ini, di mana forum musyawarah hanya bersifat

memberikan ruang diskusi, tetapi keputusan akhir tetap ditentukan oleh pemerintah kota. (Katili et al., 2022) menekankan bahwa untuk menjadikan forum konsultasi lebih efektif, diperlukan mekanisme transparansi dan umpan balik yang jelas agar warga merasa pendapat mereka benar-benar dihargai. Dalam konteks Rodanya Mas Bagia, pemerintah dan pendamping perlu memperkuat peran warga melalui edukasi perencanaan partisipatif serta mengurangi dominasi pihak luar, sehingga konsultasi dapat berkembang menuju partisipasi interaktif yang lebih bermakna.

4. Partisipasi untuk Imbalan Materi

Partisipasi masyarakat dalam program Rodanya Mas Bagia pada sebagian wilayah masih didorong oleh motivasi insentif atau imbalan materi. Artinya, warga ikut terlibat dalam kegiatan bukan karena kesadaran kolektif atau rasa memiliki program, tetapi karena adanya faktor eksternal seperti pemberian uang transport, konsumsi, atau bantuan lain yang menyertai pelaksanaan kegiatan. Temuan ini terlihat dalam pelaksanaan program fisik, seperti pembangunan infrastruktur lingkungan, maupun kegiatan nonfisik seperti pelatihan keterampilan. Kehadiran warga dalam kegiatan sering kali mengalami penurunan jika tidak disertai dengan pemberian insentif, sehingga menunjukkan bahwa partisipasi yang muncul belum sepenuhnya berkelanjutan dan berbasis pada kesadaran mandiri. Penelitian di Desa Batu Putih, program PAMSIMAS tahun 2022, mendapati bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana air dan sanitasi sangat dipengaruhi oleh insentif dalam bentuk kompensasi materi serta dukungan fasilitas dari pemerintah desa; tanpa insentif tersebut, keterlibatan masyarakat terutama di aspek tenaga dan waktu relatif rendah (Ibal & Abubakar, 2023).

Seorang pendamping program dalam wawancara menjelaskan,

"Memang dalam beberapa kegiatan warga lebih semangat kalau ada uang transport. Kalau hanya sosialisasi tanpa konsumsi atau uang transport, biasanya yang datang sedikit. Ini sudah jadi kebiasaan, bukan hanya di sini, tapi di banyak wilayah," (Wawancara dengan Pendamping Program, 10 Juli 2025).

Hal ini diperkuat oleh keterangan salah seorang ketua RT yang menyatakan,

"Kalau kegiatan kerja bakti atau pelatihan, biasanya warga mau datang kalau ada fasilitas seperti konsumsi atau uang transport. Kalau tidak, kadang kami yang harus berinisiatif memotivasi mereka supaya tetap hadir." (Wawancara dengan Ketua RT, 11 Agustus 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa motivasi partisipasi masih bersifat eksternal. Masyarakat belum melihat keterlibatan dalam program sebagai tanggung jawab bersama, melainkan sebagai aktivitas yang layak diikuti jika ada kompensasi yang mereka terima.

Kondisi ini menggambarkan bahwa partisipasi yang terbentuk belum sepenuhnya mencerminkan pemberdayaan sejati. Menurut Jules Pretty (1995), partisipasi yang berbasis pada insentif materi berada pada level yang rendah karena keterlibatan masyarakat hanya bersifat transaksional dan mudah hilang ketika insentif dihentikan. Penelitian (Afdhal et al., 2023) juga menemukan fenomena serupa dalam program pemberdayaan di daerah lain, di mana partisipasi berbasis insentif cenderung rapuh dan tidak mampu menciptakan perubahan sosial jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Magelang bersama pendamping program perlu menciptakan strategi non-materi yang dapat memotivasi keterlibatan masyarakat, seperti pengakuan sosial, pemberian peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, atau peluang pengembangan ekonomi berbasis kelompok (Palash et al., 2024). Langkah ini penting untuk mengubah partisipasi yang semula berbasis insentif menjadi partisipasi yang berlandaskan kesadaran dan tanggung jawab bersama.

5. Partisipasi Fungsional

Tahap partisipasi fungsional dalam program Rodanya Mas Bagia ditandai dengan keterlibatan masyarakat yang terorganisir melalui Pokmas (Kelompok Masyarakat) sebagai pelaksana teknis di tingkat kelurahan. Pada tahap ini, masyarakat mulai memiliki wadah untuk lebih aktif berpartisipasi, tetapi arah dan kendali utama masih berada di tangan pihak luar, yaitu pemerintah kota dan pendamping program. Dalam struktur pelaksanaan, Pokmas bekerja

mengikuti arahan dan pengawasan pendamping, sehingga perannya lebih sebagai operator teknis daripada pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah dilibatkan dalam pelaksanaan, mereka belum sepenuhnya mandiri atau memiliki kendali strategis atas program. Penelitian "Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (POKMAS) pada Program Ketahanan Pangan di Wisata Buah" oleh (Chasan & Choiriyah, 2024) menemukan bahwa POKMAS hanya menjalankan tugas teknis di lapangan sementara keputusan strategis terkait desain program dan alokasi sumber daya tetap dikendalikan oleh pemerintah desa dan pengelola program.

Pokmas memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan program berjalan sesuai pedoman pemerintah kota. Mereka bertugas mengoordinasikan berbagai kegiatan di tingkat RT, mulai dari perencanaan detail, pelaksanaan fisik, hingga pelaporan administratif. Berdasarkan wawancara dengan salah satu ketua Pokmas, tugas utama Pokmas meliputi:

- a. Melakukan belanja barang-barang yang dibutuhkan oleh tiap RT untuk pelaksanaan program, seperti material pembangunan atau peralatan pendukung kegiatan.
- b. Mengawasi dan melaksanakan pekerjaan konstruksi, misalnya pembangunan infrastruktur lingkungan atau fasilitas umum yang menjadi bagian dari program.
- c. Menyiapkan dan mengelola SPJ (Surat Pertanggungjawaban) terkait penggunaan dana program.
- d. Memvalidasi kebutuhan barang dan peralatan yang diajukan masing-masing RT agar pelaksanaan program berjalan lancar dan sesuai aturan.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan salah satu pokmas,

"Tugas kami itu seperti belanja barang-barang yang dibutuhkan RT, mengerjakan pekerjaan konstruksi, mengurus SPJ, dan memvalidasi kebutuhan barang supaya tidak ada kendala waktu pelaksanaan," (Wawancara dengan Pokmas, 7 September 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa Pokmas memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan di lapangan, terutama dalam aspek teknis dan administratif. Namun, mereka bukan pihak yang menentukan kebijakan atau arah strategis program, melainkan menjalankan tugas berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota.

Selain Pokmas, pendamping program memegang peranan yang sangat dominan. Pendamping bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota dalam mengawasi pelaksanaan program dan memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Dalam praktiknya, Pokmas sering kali bekerja sebagai pelaksana yang mengikuti instruksi pendamping. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pendamping.

"Kalau untuk mekanisme komunikasi, dari pemerintah kota disampaikan melalui dinas DPMP4KB kepada kami pendamping. Kemudian kami sampaikan ke Pokmas, selanjutnya Pokmas yang menyampaikan ke RT, lalu RT yang menyampaikan ke warga," (Wawancara dengan Pendamping Program, 10 Juni 2025).

Alur komunikasi ini memperlihatkan bahwa Pokmas memiliki peran penting sebagai penghubung antara pendamping dan masyarakat, namun mereka tetap berada dalam posisi yang diarahkan dan dikontrol dari atas.

Menurut teori Jules Pretty (1995), partisipasi fungsional adalah tahap di mana masyarakat mulai membentuk organisasi untuk mendukung program, tetapi organisasi tersebut masih berada di bawah arahan pihak luar. Dalam konteks program Rodanya Mas Bagia, dominasi pendamping menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada dalam kerangka kendali pemerintah kota. Penelitian (Amani, 2023) juga menyatakan bahwa keberadaan kelompok seperti Pokmas dapat menjadi fondasi pemberdayaan, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesempatan yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti pelatihan manajemen, transparansi dalam pengelolaan dana, dan mekanisme pengawasan yang partisipatif. Dengan cara ini, Pokmas dapat berkembang dari sekadar pelaksana teknis menjadi kelompok yang benar-benar mampu mengelola program secara mandiri, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat menuju tahap interaktif bahkan swakelola.

6. Partisipasi Interaktif

Tahap partisipasi interaktif merupakan fase di mana masyarakat mulai terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pada tahap ini, interaksi antara masyarakat, Pokmas, pendamping, dan pemerintah kota menjadi lebih intensif. Masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi atau pelaksana teknis, tetapi mulai memiliki ruang untuk berdiskusi, mengusulkan ide, dan memberikan masukan yang mempengaruhi jalannya program. Dalam konteks program Rodanya Mas Bagia, partisipasi interaktif terlihat pada proses musyawarah perencanaan program tematik yang dilaksanakan setiap tahun. Forum ini menghadirkan warga, ketua RT, Pokmas, dan pendamping program untuk bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas program pada tahun berikutnya. Penelitian di Desa Warung Bambu menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan memungkinkan warga ikut mengusulkan dan mengevaluasi kegiatan, yang meningkatkan rasa memiliki dan kualitas hasil program (Idham Noviar & Evi Priyanti, 2023). Selain itu, studi di Desa Sukasari (Program PAMSIMAS) menemukan bahwa meskipun warga dilibatkan dalam evaluasi, masih terdapat keterbatasan dalam pengaruh keputusan strategis; masyarakat lebih banyak memberikan masukan setelah pelaksanaan daripada bersama-sama menentukan arah program (Yulianti et al., 2023).

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan dengan salah seorang ketua RW.

"Biasanya pada pertengahan tahun kita ada musyawarah untuk menyusun program tahun depan. Warga, RT, Pokmas, dan pendamping hadir. Tapi tetap ada program wajib yang sudah ditentukan pemerintah, sementara yang lain sifatnya usulan tambahan dari warga." (Wawancara dengan Ketua RW/Pokmas, 10 Agustus 2025).

Kutipan ini menunjukkan adanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, meskipun masih ada batasan berupa program wajib yang sudah ditetapkan pemerintah kota. Masyarakat juga dapat menyampaikan ide dan kritik secara langsung dalam forum ini, sehingga komunikasi yang terbangun bersifat dua arah, bukan hanya instruksional. Kehadiran pendamping di forum tersebut berfungsi sebagai fasilitator yang membantu proses diskusi agar berjalan terarah dan sesuai pedoman.

Partisipasi interaktif juga terlihat pada tahap pelaksanaan program, terutama dalam kegiatan yang bersifat nonfisik seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan pemberdayaan ekonomi. Warga yang terlibat dalam kegiatan ini tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga ikut menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan. Salah seorang pendamping menjelaskan,

"Ada pelatihan yang memang diusulkan warga, misalnya keterampilan membuat produk UMKM. Jadi bukan hanya program yang kami tentukan dari atas, tapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan mereka di lingkungan masing-masing." (Wawancara dengan Pendamping Program, 11 Juni 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa program mulai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat, bukan sekadar pelaksanaan agenda pemerintah.

Menurut teori Jules Pretty (1995), partisipasi interaktif mencerminkan kemitraan sejati antara masyarakat dan pihak luar, di mana warga memiliki peran aktif dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah program. Penelitian (Azizah et al., 2022) juga menegaskan bahwa partisipasi interaktif merupakan bentuk ideal dalam program pemberdayaan karena mampu menciptakan rasa memiliki yang kuat di kalangan masyarakat. Dalam konteks program Rodanya Mas Bagia, pencapaian tahap ini masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan pendapat antarwarga dan keterbatasan kapasitas Pokmas dalam memfasilitasi diskusi. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang lebih intensif untuk mengelola dinamika kelompok dan memastikan bahwa setiap suara masyarakat benar-benar didengar dan diakomodasi. Jika tantangan ini dapat diatasi, partisipasi interaktif akan menjadi landasan kuat untuk mendorong masyarakat menuju tahap swakelola, di mana mereka mampu mengelola program secara mandiri.

7. Partisipasi Swakelola

Tahap swakelola merupakan bentuk partisipasi tertinggi di mana masyarakat memiliki

kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi program secara mandiri, tanpa bergantung pada pihak luar seperti pendamping atau pemerintah kota. Pada tahap ini, warga telah memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk mengelola sumber daya yang tersedia serta menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Dalam konteks program Rodanya Mas Bagia di Kota Magelang, tingkat swakelola belum sepenuhnya tercapai, namun tanda-tanda ke arah tersebut mulai terlihat, terutama di beberapa kelompok yang mampu mengembangkan kegiatan ekonomi mandiri setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan program. Studi tentang pelaksanaan proyek swakelola di Sumenep menunjukkan bahwa model swakelola (community-based self-managed implementation) memang mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dari perencanaan hingga pelaksanaan, tetapi pencapaian efektivitas swakelola bergantung pada kapasitas teknis dan administrasi kelompok serta mekanisme monitoring yang memadai (Suprpto et al., 2024). Selain itu, perbandingan antara pelaksanaan proyek swakelola dan kontraktual pada sektor sanitasi menegaskan bahwa swakelola memberi ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat namun seringkali masih memerlukan peningkatan kapasitas teknis dan dukungan tata kelola agar bisa bertransformasi menjadi swakelola yang mandiri dan berkelanjutan (Kharismajianti et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat menunjukkan potensi untuk mandiri, terutama setelah menerima pendampingan dan pelatihan terkait pengelolaan usaha. Salah satu pendamping program menjelaskan,

"Ada warga yang setelah ikut pelatihan, mereka kemudian mengembangkan usaha kecil-kecilan sendiri. Misalnya, ada yang membuat produk UMKM seperti makanan ringan dan dijual di lingkungan sekitar. Ini sebenarnya dampak positif dari program yang kami harapkan bisa berlanjut." (Wawancara dengan Pendamping Program, 10 Juni 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program mulai terwujud ketika warga memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha mandiri. Namun, inisiatif seperti ini masih bersifat sporadis dan belum merata di seluruh wilayah penerima program.

Pada tahap perencanaan, indikator swakelola dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal. Meskipun penyusunan RKM di sebagian besar wilayah masih dipimpin oleh Pokmas dan didampingi oleh pendamping program, terdapat beberapa RT yang sudah mulai berperan aktif dalam menentukan jenis program yang ingin dijalankan. Seorang ketua RT mengungkapkan, "Kami pernah mengusulkan program yang memang sangat dibutuhkan di lingkungan kami, dan usulan itu diterima karena sudah sesuai aturan, contohnya pengadaan kursi roda. Jadi kami merasa senang karena warga ikut menentukan apa yang terbaik untuk lingkungannya," (Wawancara dengan Ketua RT, 11 Agustus 2025). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepercayaan diri masyarakat dalam merencanakan program yang relevan dengan kebutuhan mereka sendiri.

Menurut teori Jules Pretty (1995), swakelola terjadi ketika masyarakat memiliki kendali penuh atas program dan tidak lagi bergantung pada pihak luar. Namun, pencapaian tahap ini membutuhkan waktu yang panjang, pendampingan yang konsisten, dan sumber daya yang memadai. Penelitian (Afdhal et al., 2023) menegaskan bahwa keberhasilan swakelola sangat ditentukan oleh kemampuan kelompok dalam mengelola konflik internal, membangun transparansi, dan memperkuat mekanisme akuntabilitas. Dalam program Rodanya Mas Bagia, tantangan utama menuju swakelola adalah dominasi peran pendamping dan Pokmas, yang saat ini masih menjadi pengarah utama dalam pelaksanaan program. Selama kendali strategis masih berada pada pihak luar, masyarakat akan sulit untuk benar-benar mandiri.

Meskipun demikian, potensi menuju swakelola tetap ada. Pemerintah kota dapat mendorong pencapaian tahap ini dengan memberikan pelatihan manajemen, membuka ruang pengambilan keputusan yang lebih besar bagi warga, serta mengurangi ketergantungan terhadap pendamping. Jika strategi ini diterapkan secara konsisten, maka program Rodanya Mas Bagia tidak hanya menjadi sarana pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan masyarakat yang



berdaya dan mandiri, mampu merencanakan serta mengelola pembangunan lingkungannya sendiri tanpa intervensi pihak luar.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat melalui program Rodanya Mas Bagia di Kota Magelang dengan menggunakan indikator partisipasi menurut Jules Pretty (1995). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program ini masih bervariasi pada tiap indikator, dengan kecenderungan kuat berada pada tingkat partisipasi pasif dan konsultatif, sementara pada tingkat interaktif dan swakelola masih sangat terbatas.

Secara umum, program Rodanya Mas Bagia telah memberikan dampak positif dengan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lokal. Namun, dominasi peran pemerintah dalam pengambilan keputusan masih menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan pemberdayaan yang benar-benar mandiri dan berkelanjutan.

Saran untuk pemerintah Kota Magelang bersama pendamping program perlu memperkuat komunikasi dua arah yang transparan dan memberikan pelatihan manajemen serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat dan Pokmas, sehingga ketergantungan pada pendamping dapat dikurangi. Selain itu, mekanisme partisipasi yang berbasis kesadaran kolektif perlu dikembangkan agar tidak hanya bergantung pada insentif materi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode campuran agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., Mustanir, A., Ilmi, A., Aksal, F., Iwan, M., Kusnadi, H., Fauzan, R., Duwi, A., Rina, S., & Abdurrohman, W. (2023). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT* (S. Psi. , S. Sos. , S. P. Afriansyah, Ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Amani, A. (2023, March 6). *Rodanya Mas Bagia Sukses Berdayakan Masyarakat Kota Magelang*. Suara Merdeka.
- Anggi Maharani Nasution, Nadia Ulfa, & Nurhayati Harahap. (2023). Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 208–216. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1943>
- Azizah, N., Jaelani, D., & Yanti Budiyantini, I. (2022). *DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA RANCAEKEK KULON*.
- Bartels, W. L., & Furman, C. A. (2023). Building Community for Participatory Modeling: Network Composition, Trust, and Adaptive Process Design. *Society and Natural Resources*, 36(3), 326–346. <https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2177916>
- Chasan, P. N., & Choiriyah, I. U. (2024). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (POKMAS) pada Program Ketahanan Pangan di Wisata Buah. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 65–81. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8520>
- Frahsa, A., Liwanag, H. J., Kobler Betancourt, C., Ipekci, A. M., Minder, B., & Schow, D. (2025). A scoping review of community participation in public health research and action during the COVID-19 pandemic: Exploring approaches on the continuum between utilitarianism and empowerment. In *Social Science and Medicine* (Vol. 385). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.118556>
- Heriyanti, A. P., & Rabbani, T. Z. (2025). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Dusun Begajah, Desa Jatijajar, Kabupaten Semarang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 24(1), 46–58. <https://doi.org/10.14710/jkli.65998>
- Ibal, L., & Abubakar, E. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2022 di Desa Batu Putih



- Kabupaten Konawe Selatan. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i1.150>
- Idham Noviar, & Evi Priyanti. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa*.
- Katili, M. R., Lahay, S. N., & Amali, L. N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Potensi Lokal Desa Untuk Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(2), 465–477. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v11i2.12214>
- Kharismajianti, V., Chalid, A., Namara, I., Phh Mustofa No, J., Kec Cibeunying Kidul, C., Bandung, K., & Barat, J. (2024). *Analisis Perbandingan Pengelolaan Sanitasi Swakelola dan Kontraktual Terhadap Pembangunan Kontruksi MCK Dan Septitank Individual*. 7(1). <https://doi.org/10.33087/daurling.v7i1.229>
- Palash, M. S., Haque, A. B. M. M., Rahman, M. W., Nahiduzzaman, M., & Hossain, A. (2024). Economic well-being induced Women's empowerment: Evidence from coastal fishing communities of Bangladesh. *Heliyon*, 10(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28743>
- Pemerintah RI. (2023, May 16). *Jelang Tahun Terakhir RPJMN Wapres Tekankan Rencana Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Putra Satria, A., Abadi, T. W., Asy'ari, N. A. S., & Anatanatorn, A. (2025). Organizational Communication Culture in Village Governments and the Quality of Administrative Services in Sidoarjo District of Indonesia. *ETTISAL: Journal of Communication*, 10(1), 83–106. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v10i1.13658>
- Rasidi, H. F. M. R. (2023). ANALISIS PROGRAM UNGGULAN RODANYA MAS BAGIA KOTA MAGELANG BERBASIS CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT (CIPP). In *Jurnal Inovasi Daerah: Vol. II* (Issue 1). <http://jurnal.magelangkota.go.id>
- Ristanto, & Supardal. (2024). *Peranan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Magelang*.
- Sukrianto, A., & Mahendra, G. K. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kalurahan Sendangagung*. 4(4). <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.486>
- Suprpto, A. ', Wulandari, E., Tjendani, H. T., & History, A. (2024). International Journal of Social Science and Community Service Analysis of Contractual Based Construction Implementation and Self-Managed Construction Implementation Based on Community Empowerment A RTICLE INFO A BST RA CT. In *International Journal of Social Science and Community Service* (Vol. 2024, Issue 3). <https://ijsscs.com/index.php/journal>
- Udhiya, L., Ramdani, R., Program,), Pemerintahan, S. I., Sosial, I., & Politik, I. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA. *Communnity Development Journal*, 5(3), 5434–5437.
- Yulianti, R., Ibrahim, T., & Astuti, W. (2023). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) (Studi Kasus di Desa Sukasari Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis)*..